

(penjual dan pembeli), adanya uang, barang, dan akad. Namun pada jual beli ini tidak memenuhi syarat objek yang diperjualbelikan maka hukum jual belinya tidak diperbolehkan.¹³

Yang kedua ditulis oleh Isma Wahyu Fadilah (2013) dengan judul: *Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon Rusak Di Pasar Wonokromo*, skripsi ini membahas suatu permasalahan yang dikaji yakni diantaranya, dalam bentuk praktik jual beli handphone rusak yang berada di Pasar Wonokromo terdapat dua bentuk praktik yaitu, (1) dilaksanakan secara beja-beji yakni untung-untungan dan pembeli dianjurkan untuk membayar dahulu tanpa si pembeli mengetahui kondisi handphone yang rusak tersebut masih bisa dimanfaatkan ataupun tidak, dan para pembeli juga belum mengetahui dalamnya handphone tersebut melainkan hanya mengetahui kondisi luarnya saja. (2) analisis hukum Islam pada jual beli handphone rusak yang mana jual belinya dianggap sah, namun jika dilihat dari bentuk praktik jual belinya bahwa bentuk praktik yang semacam itu menyebabkan adanya larangan akad, yang mana jual beli handphone rusak dipandang telah melanggar prinsip *antāradin minkum* dan melanggar prinsip *la tazdlimūn wa lā tudzlamūn* (jangan mendzalimi dan jangan didzalimi) yang mana dalam bentuk praktik tersebut terdapat *gharar* (ketidakjelasan).¹⁴

¹³Lukmanul Khakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Ikan Laut Dalam Tendak Di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

¹⁴ Isma Wahyu Fadilah, "Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak Di Pasar Wonokromo", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

Yang ketiga ditulis oleh Diswatin Nunung (2010) dengan judul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nelethong Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban : Studi Analisis Hukum Islam*”. Skripsi ini membahas suatu permasalahan yang dikaji yakni diantaranya, membahas praktik jual beli Nelethong (jual beli hewan ternak dan juga beberapa anak hewan ternak yang masih berada dalam kandungan induknya). Yang mana analisis hukum Islam pada transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).¹⁵

Sedangkan di dalam skripsi ini berbeda dengan yang ditelusuri oleh peneliti di atas mengenai objek yang dibahas dan diteliti serta dari perbandingan yang akan dituangkan dari pasal 76 KHES dan pandangan tokoh agama setempat mengenai transaksi jual beli tersebut, yang membedakan adalah bagaimana pendapat dan anggapan dari beberapa tokoh agama di desa Sumber Anyar tersebut yang membolehkan melakukan jual beli anak sapi di dalam kandungan induknya dengan menitikkan pada saling adanya kepercayaan dan pertanggungjawaban dari penjual dan para pembelinya. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan antara isi dari pasal 76 KHES mengenai objek dari jual beli itu harus diketahui dan harus jelas adanya. Namun tetap saja tokoh agama di desa setempat itu menganggapnya sah jika dilandaskan terhadap saling percaya antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

¹⁵ Diswatin Nunung, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Nelethong Di Desa Tergambang Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban : Studi Analisis Hukum Islam”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

dari pemilik bisnis jual beli anak sapi dalam kandungan, praktik jual beli anak sapi dalam kandungan, proses pelaksanaan akad yang terjalin antara penjual dan pembeli anak sapi dalam kandungan, pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Bab keempat : Berisikan tentang analisis antara pasal 76 KHES dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli anak sapi dalam kandungan dan pandangan tokoh agama tentang jual beli anak sapi dalam kandungan di Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

BAB kelima : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang menyeluruh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, dan saran-saran yaitu membuat nasehat atau rekomodasi hukum diberikan kepada penulis terkait permasalahan yang di bahas.